

CEUREUMÉN

REKONSTRUKSI ACEH

NO. 32 ■ 2 NOPEMBER 2006 ■ DUA MINGGUAN

http://www.e-aceh-nias.org/media_center/newsletter.aspx

PANTON

Di laot pukat di darat moto
Ureung nyang mugoe pade meungna
Ta meurakan bek beurangkahe
Ban dua uroe troh keunoe teuka

Peu meurak-grak lam bak teubee
Aneuk ceurapee ateu bak langsung
Jamee ban teuka pareksa dilee
Bekroh ji tipe oh lheuhek duk pakat

Tajak ngon moto tawoe ngon tapak
Jalan ka rusak oh lheuhek tsunami
Wahe syedara nyang na di barak
Nue jaga jarak ngon ureung teumaki

Buya krueng bandum teudong-dong
Buya ban tamoeng meuteume raseuki
Wahe syedara di kota ngon di gunung
Persatuan beukong peugadoh iri
deungki

NURMAN SYAMHAS

Pilkada Sebentar Lagi

Pesta demokrasi terbesar di Aceh sudah di depan mata, cuma menghitung hari saja. Semua tahapan nyaris semuanya dilalui para bakal calon gubernur, wa-

likota dan bupati. Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai penyelenggara juga sudah siap "lahir batin". Mereka juga sudah menyiapkan daftar pemilih semenrata. Lantas

bagaimana dengan pemilih itu sendiri? Tahukah mereka apa itu Pilkada, sudah terdada atau tidak? Laporan *Ceureumén* edisi ini mencoba menguak itu. **Baca halaman 4 - 5**



2



Meneliksi Kinerja SAK BRR

3



Penyewa Lawan Kebijakan BRR

7



Good Morning Meuraxa...

Habis Konflik, Terbitlah...

Dina Damayanti

Banda Aceh
dina_yanti01@yahoo.com

“Kalau dulu kita waspada karena konflik, sekarang karena perampokan,” kata Rusli (45) warga Pidie pada *Ceureumén*. Pria yang bekerja sebagai pengusaha ini mengaku agak cemas dengan keamanan di Aceh, terutama dengan banyaknya aksi kriminalitas bersenjata di Aceh.

Setelah perdamaian dicapai, tingkat kriminalitas bersenjata di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ternyata justru memang meningkat. Lihat saja data dari Lembaga KontraS Aceh.

Gagalnya re-integrasi?

Data itu menyebutkan sejak ditandatangani perjanjian damai 15 Agustus 2005 hingga Oktober ini, sudah 70 aksi kriminalitas bersenjata di Aceh. Dan masih menurut KontraS

Aceh, dari 70 aksi perampokan, 15 kasus diduga kuat dilakukan oleh mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sebuah lainnya melempar anggapan “tuduhan” itu sebagai bentuk klaim seolah-olah oknum GAM itu sebagai perampok. Kendati, kasus terbanyak terjadi di Aceh Timur (16 kasus), Aceh Utara (14 kasus), Pidie (13 kasus), dan Bireuen (11 kasus). “Dilihat dari lokasinya, semua peristiwa dominan terjadi di lima kabupaten yang dijuluki daerah hitam saat konflik,” kata Hendra dari KontraS Aceh.

Kondisi ini dilihat sebagai sebagai aktivis sipil Aceh sebagai akibat kemiskinan pasca bencana dan gagalnya pemerintah melakukan program re-integrasi. “Meningkatnya kriminalitas menjadi bukti bahwa ada yang salah dengan proses reintegrasi pasca perjanjian damai,” kata

Akhiruddin dari Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK).

Sebuah informasi ditubuh Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) menyatakan reintegrasi tidak gagal, karena proses itu bukan semata-mata soal bagi *peng bicalah* (bagi uang receh). Banyak sektor yang sudah dijalankan. “Penyaluran dana hanya salah satu jalur yang sedang berjalan secara bertahap,” jawab Pelaksana harian BRA, Yusny Saby.

Lamban

Selain itu, menurut Akhiruddin pemerintah terkesan lamban dan tidak serius menangani masalah reintegrasi. Malah BRA yang seharusnya mengurus soal reintegrasi ini hanya bekerja untuk menyalurkan dana. “Padahal yang dibutuhkan oleh mantan kombatan, bukan saja dana melainkan juga jaminan mengelola modal dan perubahan perilaku,” katanya. ■



>> CEK BANUN



>> SMS

Seharusnya *Ceureumén* menampilkan nama-nama bakal calon walikota dan bupati di semua kabupaten kota yang akan ikut Pilkada. Kami sangat butuh informasi itu? Sebab kami bisa tahu nama kandidat yang akan jadi pemimpin di Aceh nanti.

Harmaini
0852608266xx
Muara Tiga, Kab Pidie

Kapan kami warga Ulee Lheue dusun Kakap mendapat rumah? Di tenda hampir 2 tahun, di barak mau berapa tahun? Makanya, kemungkinan Pilkada nanti kami tidak ikut, sebelum ada kepastian akan nasib kami.

Rita
0813602825xx
Dusun Kakap, Ulee Lheue

RALAT

Tulisan "Menganaktirikan Radio Komunitas" yang dimuat *Ceureumén* edisi 30, di Rubrik Fokus halaman 3, pada alenia 8 dan 9 terdapat kesalahan ejaan yang sangat mengganggu. Di sana tertulis AIR.Net (Aceh Emergency Radio Network) seharusnya AER.Net (Aceh Emergency Radio Network).

Begitu pula pada alenia 9 tertulis ARR.Net, seharusnya ARRnet (Aceh Reconstruction Radio Network. Ini adalah dua program yang berbeda, AER.Net menangani persoalan tersebut pascatsunami, sedangkan ARRnet dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Masih pada halaman yang sama, kesalahan yang sedikit mengganggu juga terdapat pada judul artikel yang berjudul KPID: Kami Tidak Mempersulit, seharusnya KPID: Kami Tidak Mempersulit. KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Di Aceh lembaga ini diketua Dr. Iskandar A. Gani, S.H.

Kepada yang berkompeten yang minta maaf atas kesalahan ini. Dengan ralat ini kesalahan sudah diperbaiki. Terima kasih.

Redaksi.

>> KORUPSI

Menelisis Kinerja SAK BRR

Muhammad Azami

Banda Aceh
muhammad2004@yahoo.com

Apakah kerja SAK BRR belakangan ini? Inilah pertanyaan yang banyak muncul dari mulut warga. Soalnya, seperti ditulis oleh banyak media massa, kualitas proyek rehab dan rekon Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias banyak mengecewakan. Sementara satuan antikorupsi yang sengaja dibentuk BRR tak terdengar lagi gangunya.

Kepala Satuan Antikorupsi (SAK) BRR Aceh-Nias, Achmad M.M. Jogasara mengatakan, dirinya tidak bisa menjelaskan secara gamblang seberapa besar manfaat SAK BRR ini bagi proyek rehab dan rekon. "Sulit mengukurnya," jawabnya kepada *Ceureumén*, pekan lalu.

Yang pasti, lanjut dia, SAK BRR dalam kerjanya tetap berorientasi pada pencegahan korupsi. Ini merupakan orientasi yang berbeda dengan langkah pendahulunya, saat lembaga tersebut dijabat oleh Kevin Evans. "Kini 55 persen fokusnya ke pencegahan," kata Achmad M.M. Jogasara

Tiga Fungsi

Dia menegaskan, ada tiga fungsi SAK, yaitu pencegahan, inves-

tigasi, dan pendidikan. Ketiga fungsi ini harus dijalankan. Cuma, katanya, fokusnya lebih besar ke arah pencegahan. Dalam melakukan monitoring terhadap paket barang dan jasa, diawali dengan pengumpulan data, lalu memonitor setiap tahapannya.

"Apalagi ketika sudah ada pengaduan dari pihak-pihak yang berkepentingan, sampai pada kondisi bisa dikatakan bahwa kita sebenarnya melakukan audit terhadap proses itu. Kita lihat apakah di situ terjadi kesalahan prosedur, atau bahkan indikasi kuat KKN," timpal Ade Dikdik Isnandar, Manajer Pencegahan Korupsi SAK BRR.

Saat ditanya, apakah indikasi korupsi di BRR dalam pengadaan buku "Membangun Tanah Harapan" pernah juga dipersoalkan oleh SAK sebelumnya, Achmad menganggukkan kepalanya. "Kita telah melakukan audit investigatif malah, bukan hanya prosedural. Akan tetapi, karena kejaksaan sudah masuk, ya kita tidak mem-beri opini, karena kejaksaan sudah jalan," katanya.

Hingga kini, SAK BRR telah mengeluarkan 233 rekomendasi yang ditujukan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam rehab dan rekon. Misalnya menyangkut in-

dikasi adanya KKN, SAK mengeluarkan 44 rekomendasi. (lihat box)

Tiga kasus ke KPK

Achmad membeberkan bahwa pihaknya telah mengirim tiga kasus korupsi kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dikatakan, pihaknya mengirim kasus-kasus yang sudah sangat kuat indikasi korupsinya. Namun, hasilnya sangat tergantung kepada KPK untuk menindaklanjutinya atau tidak. "Kalau soal penindakan ada di penegak hukum KPK," katanya. Sayangnya, dia enggan menyebutkan kasus tersebut. Yang pasti, katanya, nilai proyeknya mencapai miliaran rupiah.

Achmad tidak membantah bahwa penyimpangan bisa jadi banyak terjadi di lapangan, khususnya untuk proyek perumahan. Bahkan untuk Nias, akunya, banyak terjadi penyimpangan proyek perumahan, meski SAK hanya menginvestigasi sebanyak 15 persen sampel.

Itu sebabnya kini, khusus untuk Nias, pihaknya meminta tidak lagi memeriksa sampel rumah, tapi populasi atau keseluruhannya. Kebijakan ini ditempuh lantaran saat SAK memeriksa sampel rumah sebanyak 15 persen, banyak di antaranya ditemukan penyimpangan. "Kita telah mem-

inta kepala regional untuk memeriksa 100 persen populasi," jelasnya. SAK BRR berharap, secara bertahap hal ini juga bisa diterapkan untuk Aceh.

Sosisialisasi

SAK BRR bekerjasama dengan KPK juga telah menyosialisasikan seputar pemberantasan korupsi dan permasalahannya di 23 kabupaten/kota di Aceh dan Nias. "Kita mengundang semua stakeholder, seperti NGO, Pemda, aso-

siasi perusahaan, dan lainnya," paparnya. Selama ini, tambahnya, masyarakat memahami bahwa sebuah tindakan disebut korupsi jika telah mengakibatkan kerugian negara. Sebagian kalangan pun, katanya, masih ada pihak yang menganggap bahwa SAK BRR menghambat rehab dan rekon, bahkan termasuk dari kalangan internal BRR sendiri. Nah, siapakah mereka itu? Jogasara enggan menyebutnya. ■

Rekomendasi

Jenis temuan	Jumlah Rekomendasi
1. Pelanggaran prosedur pengadaan:	90
2. Pelanggaran administrasi pengadaan:	8
3. Pelanggaran pakta integritas:	3
4. Indikasi KKN:	44
5. Tindak pidana umum:	7
6. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi:	37
7. Kewajiban penyeteroran ke kas Negara/Daerah:	21
8. lain-lain:	23
Total:	233

* Per 13 September 2005 – 31 Agustus 2006

Silakan Mengadu ke SAK BRR:
Email : antikorupsi@brr.go.id
Nomor Kontak: 081534066390

Soal Renters Korban Tsunami

Penyewa Lawan Kebijakan BRR



Beberapa anggota penghuni barak Peunayong Banda Aceh sedang mencuci di kamar mandi darurat. Hingga saat ini terdapat sekitar 15.000 keluarga masih tinggal di barak. Mereka umumnya korban tsunami yang dulunya berstatus sebagai penyewa.

Dina Damayanti

Banda Aceh
dina_yanti01@yahoo.com

Puluhan ribu rumah sudah dibangun dan sedang dibangun. Aceh yang dulu sebahagian besar rata diterpa gelombang tsunami kini mulai mengeliat. Dan rumah-rumah itu muncul bagaikan jamur di musim hujan. Tumbuh dimana-mana. Tanda rekonstruksi dan rehabilitasi mulai berjalan pesat.

Syahbani (42) pengungsi korban tsunami asal Kampung Mulia Banda Aceh melihat maraknya pembangunan rumah. Celakanya Syahbani bukanlah pemilik salah satu rumah itu. Janda enam anak itu hanya bisa gigit jari karena dia tidak akan dan tidak akan pernah mendapatkan bantuan rumah.

Alasannya? Syahbani hanyalah korban tsunami yang waktu musibah datang dua tahun lalu berstatus penyewa, alias mengontrak rumah

orang, alias tidak pernah memiliki rumah di Banda Aceh.

"Saya sudah 20 tahun tinggal di Banda Aceh, suami dulu penjual ikan. Dan kini sudah meninggal karena tsunami," katanya pada *Ceureumén* saat mengunjunginya di Barak Pengungsian Stadion Lhong Banda Aceh.

Sudah mengisi formulir

Bukan hanya Syahbani yang gelisah. Banyak penghuni barak yang berstatus penyewa atau renters yang kini pusing tujuh keliling. Mereka berharap pemerintah melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) segera memberi bantuan perumahan.

"Apalagi bulan Desember ini kami dengar barak harus dihancurkan karena sewa tanah habis. Mau kemana kami semua," ujar Muhammad (50) salah seorang penghuni barak Lhok Nga dengan muka prihatin.

Sambil menghembuskan asap rokok dari bibirnya yang hitam kebiruan, Muhammad berkisah kalau dirinya sudah lelah mengisi formulir bantuan rumah dari lembaga bantuan di Aceh.

Dan ternyata itu juga sama dengan yang dialami Efendi, warga barak stadion Lhoeng.

"Entah sudah berapa kali kami mengisi formulir.

Dan entah sudah berapa kali difoto. Tetapi rumah tetap saja tidak ada," keluh Efendi.

Serba mahal

Namun beberapa waktu yang lalu beberapa warga barak mendengar

bahwa penyewa atau renters tidak akan pernah memperoleh bantuan perumahan.

"Katanya kami tidak kehilangan rumah sebagaimana yang lain. Tetapi kami ini kan juga korban? Malah kehilangan suami," ujar Syahbani sambil tersenyum kecut.

Yang pasti setelah barak habis masa huninya baik Syahbani, Efendi maupun Muhammad tidak tahu harus berteduh dimana. Jangankan membuat rumah, menyewa saja tidak mampu.

"Harga sewa rumah tinggi sekali. Mana mampu kami yang korban tsunami ini tinggal lagi di rumah sewa," ungkap Syahbani serius.

Dana BSBT

Para penyewa memang akan memperoleh bantuan 40 persen dari dari harga rata-rata satu rumah tipe 36 tan-

pa pajak. Berdasarkan perkembangan jumlah 40 persen itu akan ditambah Rp. 5 juta untuk membeli tanah.

"Para renters ini akan diberi dana itu yang kemudian disebut sebagai dana bantuan sosial bertempat tinggal atau BSBT," kata Kasru Susilo, advisor Kebijakan dan Program BRR.

Khusus soal barak, Kasru mengatakan semua barak akan habis sewa tanahnya bulan April 2007. "Jadi kita usahakan sebelum April semua renters sudah mendapat bantuan hingga bisa bertempat tinggal di tempat selain barak," katanya.

Kendati demikian Kasru yakin akan ada masalah saat pengidentifikasian korban tsunami yang renters. "Tetapi akan kita usahakan agar semua bisa beres," katanya.

Sepertinya semakin jauh harapan korban tsunami

6 Alasan BRR Memberi Penyewa Bantuan Sosial Bertempat Tinggal (BSBT)?

- Menyewa tempat tinggal
- Melakukan Kontrak Sewa Tempat Tinggal
- Melakukan kontrak sewa-beli tempat tinggal
- Sebagai uang muka untuk membeli rumah untuk angsuran Kepemilikan Kredit Perumahan (KPR)
- Membeli tanah siap bangun untuk dipakai membangun rumahnya sendiri
- Membangun rumah di atas tanahnya sendiri di tempat lain atau tanah yang dihibahkan pada yang bersangkutan

7 Alasan Mengapa Penyewa Korban Tsunami Berharap Bantuan Rumah

- Kebanyakan renters berpenghasilan kecil sehingga tidak akan pernah sanggup membangun rumah
- Mereka juga korban tsunami dan juga kehilangan harta juga nyawa
- Dana Bantuan Sosial bertempat tinggal (BSBT) yang akan disalurkan tidak cukup untuk membangun rumah
- Harga sewa rumah di Banda Aceh sangat tinggi
- Membangun rumah butuh material, dan di Aceh material sangat tinggi
- Sulit mencari tanah murah
- Mereka sudah banyak diiming-imingi bantuan rumah oleh lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan BRR



REDAKSI CEUREUMeN



Pemimpin Umum: Sim Kok Eng Amy ■ **Sekretaris Redaksi:** Siti Rahmah ■ **Redaktur/Wartawan:** Nani Afrida, Mohammad Avicenna, Muhammad Azami ■ **Koordinator Artistik:** Maha Studio ■ **Fotografer:** Hoti Simanjuntak ■ **Bagian Keuangan:** Atik Hidayati ■ **Bagian Umum:** Ratnasari Dewi, Andi Yoga Tama ■ **Bagian Sirkulasi:** Surya Windu ■ Dengan kontribusi wartawan lepas di Aceh ■ **Alamat:** Jl. Prada Utama No: 11 A. Gampong Prada, Banda Aceh. PO BOX 061 Banda Aceh 23001. Email: ceureumen@gmail.com ■ Perceetakan dan distribusi oleh *Serambi Indonesia*.

CEUREUMeN merupakan media dwi-mingguan yang didanai dan dikeluarkan oleh Decentralization Support Facility (DSF atau Fasilitas Pendukung Desentralisasi). DSF merupakan inisiatif multi-donor yang dirancang untuk mendukung kebijakan desentralisasi pemerintah dengan meningkatkan keselarasan dan efektifitas dukungan dari para donor pada setiap tingkatan pemerintahan. Misi dari CEUREUMeN adalah untuk memberikan informasi di Aceh tentang rekonstruksi dan berita yang bersifat kemanusiaan. Selain itu CEUREUMeN diharap bisa memfasilitasi informasi antara komunitas negara donor atau LSM dengan masyarakat lokal.

>> KOMENTAR ANDA

Pembaca yang budiman!

Ternyata animo untuk memberi pendapat soal syariat Islam cukup banyak masuk ke redaksi *Ceureumén*. Berikut kami turunkan lagi komentar tersebut. Selamat membaca!

Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan kepada yang terhormat pimpinan WH, 1). Program lebih kreatif jangan hanya menjadi dikenal dengan razia dan cambuk. 2). Arab Saudi menjadi contoh konkret untuk penerapan Syariat Islam. 3). Konsisten dengan tujuan syariat Islam disertai dengan sikap profesional para bawahannya. Semoga ke depan Aceh lebih terkenal dengan nuansa Islam yang lebih kental dengan ilmu dan karya seperti para pendahulu kita.

Rahmat Hasan
0813605549xx

Jln Gabus No. 33, Lamprit Banda Aceh

Saya sangat setuju dengan Syariat Islam di Aceh, tapi harus benar Syariat jangan bersyariat alasan-alasan dan yang penting harus adil jangan memandang bulu, baik ia gubernur, kalau dia melanggar, hukum aja sesuai dengan hukum syariat.

Annas Syaputra
0852608897xx

Matang Glumpang dua, Jl. Cot Ijuek Jangka,
Cot Rabo Baroh Kabupaten Bireuen.

Syariat Islam sudah diterapkan disejumlah kabupaten, namun masih ada beberapa tempat yang menurut saya seperti tidak tersentuh sama sekali. Buktinya, masih merajalelanya judi togel, mabuk-mabukan, kaum hawanya dalam berbusana masih terlihat aduhai. Lantas apakah ini sepenuhnya tugas Wilayatul Hisbah? Karena itu wahai umat yang beradab sadarlah sebelum azab kembali tiba.

Amiruddin
0813602892xx

Keude Calang, Aceh Jaya

Tolong syariat islam jangan Cuma berlaku dibawah saja. Jangan kayak pisau. Tajam ke bawah tumpul ke atas.

Banta K.
0852607590xx

Desa Ujung Lamie, Kab. Nagan Raya

Assalamualaikum Wr.Wb. Saya sangat mendukung jika syariat Islam di Aceh jadi dilaksanakan agar semua masyarakat yang tinggal di bumi Aceh yang tercinta ini. Bahwa syariat Islam sangatlah penting bagi kehidupan dunia akhirat. Apalagi di Aceh mayoritas beragama Islam. Terima kasih hanya ini yang bisa saya sampaikan.

Said Fadli
0852702712xx

Bayu, desa Beunot Aceh Utara

Tabloid *Ceureumén* membuka rubrik "Komentar Anda". Rubrik ini mengundang partisipasi pembaca untuk memberi komentar terkait dengan topik yang akan kita bahas per edisi.

"Komentar Anda" akan hadir setiap dua edisi atau setiap edisi bernomor genap *Ceureumén*. Anda bisa mengirim pendapat ke nomor **081360044730** dengan menulis komentar_isi komentar Anda, serta alamat tempat tinggal Anda. Komentar Anda bisa juga dikirim melalui email: **ceureumen@gmail.com**, atau lewat surat ke **PO Box 061 Banda Aceh 23001**.

Topik selanjutnya untuk edisi 34 adalah:

Menjelang 2 tahun pasca tsunami di Aceh dan Nias, apakah anda senang dengan progres dan kualitas rekonstruksi secara umum?



FOTO: FOTO HOTEL SIMANUNJUK

Pilkada Sebentar Lagi, Tapi..

Samiaji Bintang

Aceh Besar
samiaji.bintang@gmail.com

Musibah dua tahun lalu ikut menggulung Lhokseudeu, Aceh Besar. Kini, warga di kawasan itu kembali menggeliat, setelah hampir dua tahun lamanya. Sebanyak 213 warga yang selamat masih belum menikmati listrik. Informasi jadi barang mewah, apalagi cerita soal Pemilihan Kepala Daerah.

"Radio tidak ada. Koran harus beli ke kota, jauh. Ongkos L-300 mahal," kata Faisal, warga setempat. L-300 adalah jenis minibus yang menjadi angkutan umum utama antar kota kabupaten di pesisir pantai barat Aceh. Sebelum tsunami, ongkos dari Lhokseudeu ke Banda Aceh Rp 5.000 sekali jalan. Kini melonjak lebih dari dua kali lipat.

Tak tahu Pilkada

Makanya tak heran, bila informasi Pemilihan gubernur dan bupati baru, tak sampai ke sana. "Tapi Abang sudah tahu 'kan tanggal 11 Desember nanti ada pemilihan gubernur dan bupati baru?" tanya saya lagi. Faisal terdiam. Dia kemudian menggeleng.

Lhokseudeu merupakan satu dari empat dusun yang berada di gampong Layeun, kecamatan Lhoong, Aceh Besar. Tiga dusun lainnya, dusun Teungoh, Ujong, dan Singgahan. Letak

dusun-dusun itu persis di bibir pantai dan dilalui jalan utama Banda Aceh-Meulaboh. Gundukan bukit berada di belakang pemukiman warga.

Jarak tempuh dari Banda Aceh ke Lhokseudeu memakan waktu satu jam. Kondisi jalan rusak berat. Gundukan tanah yang sengaja ditinggikan atau polisi tidur mencegah setiap kendaraan melaju seandainya. Jalanan berdebu ketika panas dan becek begitu disemprot hujan.

Minim informasi

Teuku Bukhari, kepala dusun Lhokseudeu, membenarkan betapa minim informasi yang dapat diakses warganya akibat prasarana yang buruk. Kabar tentang pemilihan kepala daerah atau Pilkada juga terdengar sayup. Bahkan, sampai pekan kedua bulan Oktober lalu belum ada petugas yang mendata calon pemilih di kampungnya.

"Cuma dengar cerita-cerita saja, tapi belum tahu kapan pastinya. Gampong kami kurang diperhatikan," kata Bukhari. Dia sudah enam tahun jadi kepala dusun.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) jauh-jauh hari sudah menetapkan tanggal 11 Desember 2006 sebagai waktu pencoblosan. Selain memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur, pada hari itu juga warga di 19 kabupaten dan kota bakal mencoblos pasangan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Biaya besar

Menurut catatan KIP, jumlah pemilih sementara hingga pertengahan September kemarin sebanyak 2.556.115 orang dan tempat pemungutan suara diperkirakan berjumlah 8.579. (Lihat box tabulasi DPS & TPS). Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 17,25 miliar. Besar dana untuk Aceh Besar Rp 2,043 miliar.

Ini akan jadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Aceh. Komisi Uni Eropa dan beberapa negara asing sudah berencana menurunkan tim pemantau selama proses pemilihan berlangsung. Pilkada ini amat menentukan nasib dan masa depan Aceh.

Pun begitu, Yunus sama sekali tak berharap banyak pada Pilkada. Dia warga dusun Meunasah. Hampir setahun setelah bencana, lelaki berusia 43 tahun itu membuka warung kecil di muka rumah panggung berdinding kayu bantuan *American Red Cross*.

"Kita ini cuma orang gampong. Ikut memilih karena orang lain ikut memilih. Memilih atau tidak, sama saja," katanya kepada saya. Pilkada memang sebentar lagi, tapi... ■



**) Samiaji Bintang adalah kontributor sindikasi Pantau di Banda Aceh*

Kisah Pemilu di Masa Lalu

Samiaji Bintang

Banda Aceh
samiaji.bintang@gmail.com

Ketika pemilihan umum atau pemilu digelar di Aceh pada 1999, partisipasi pemilih tak lebih 30 persen dari total penduduk. Ini bentuk boikot warga Tanah Rencong terhadap pemerintah Jakarta yang masih menetapkan Aceh sebagai Daerah Militer. Ribuan nyawa tewas selama militer menggelar operasi mereka.

Jutaan warga Aceh tidak tertarik dengan pemilu. Warga justru menuntut pelaksanaan referendum, seperti yang diberikan pemerintah Jakarta kepada Timor Leste. Grafiti bertuliskan 'referendum' lebih semarak ketimbang lambang dan bendera partai politik. Aksi menuntut referendum jauh lebih banyak dihadiri warga ketimbang panggung kampanye partai.

Peran tentara?

Pada pemilu 2004, persentase partisipasi pemilih di Aceh dilaporkan meningkat hingga 94 persen. Si pelapor adalah Jenderal Ryamizard Ryacudu. Ketika itu dia menjabat Kepala Staff Angkatan Darat (Kasad) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut Ryamizard, partisipasi warga meningkat berkat peran TNI serta pihak kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan pemilu.

Laporan Ryamizard ditampik sejumlah lembaga swadaya masyarakat nasional. Imparsial, salah satunya. Lembaga ini dipimpin Munir, aktivis hak asasi manusia yang mati diracun di atas pesawat Garuda menuju Amsterdam dari Jakarta. Badan Intelijen Negara diduga berada di balik pem-

bunuhan keji ini.

Selain Imparsial, lembaga lain seperti *Centre for Electoral Reform*, Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, *Aceh Election Watch*, *Aceh Working Group*, dan Jari ikut menolak laporan Ryamizard.

Pemilu "darurat"

Menurut mereka, angka tersebut mustahil bisa dibuktikan dan dipercaya. Pasalnya, Aceh masih dalam keadaan darurat. Bisa jadi orang ikut pemilu di bawah tekanan atau paksaan. Komisi Pemilihan Umum saat itu pun tidak mengeluarkan pernyataan resmi soal pemilu di Aceh.

"Keamanan waktu itu memang agak sulit," sahut Abdullah, seorang warga dusun Meunasah di gampong Pasi. Letaknya diapit perbukitan dan laut. Setelah tsunami, hanya 336 jiwa yang selamat dari 1.200 jiwa penduduk yang pernah ada. Lebih separuh daratan menjelma kolam. Mata pencaharian penduduk rata-rata berladang dan menangkap ikan.

Dulunya, Abdullah berstatus anggota Keamanan Rakyat (Kamra) yang mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kini Abdullah menjadi Panitia Pemilihan Gampong (PPG) Pasi. Tugasnya mendata, menyebarkan informasi, hingga menyiapkan perangkat dan logistik.

Namun, Abdullah lebih optimistis kerang. "Dibandingkan sebelumnya, sekarang InsyaAllah sudah jauh lebih aman," katanya. Setahun setelah perjanjian damai Helsinki, wajah Aceh jauh lebih baik. Salah satu buah dari perjanjian itu adalah Pilkada.



Siapa Calon Anda?

Dina Damayanti

Pidie
dina_yanti01@yahoo.com

Terlalu banyak calon

Warga di kabupaten Pidie pada umumnya tidak begitu memikirkan Pilkada. Warga kawasan Tangse Pidie misalnya terlalu sibuk dengan wabah *antrax* yang menyedot ternak mereka.

"Kira-kira yang terpilih pilkada nanti mau tidak mengunjungi kami di tempat terpencil seperti ini?" tanya mereka kepada *Ceureumen*.

Kendati demikian mereka mempunyai komentar khusus soal Pilkada Desember mendatang. "Calonnya banyak ya. Belum lagi calon bupati Pidie," kata Marwan, salah seorang warga Tangse. Beberapa tempat di kawasan Tangse juga ditempel poster dan stiker kandidat. Namun hanya beberapa kandidat saja yang ada.

Di kawasan Teubeng, Pidie, kawasan yang pernah menjadi wilayah konflik itu justru terlihat lebih tenang. "Kami cuma tahu kandidat dari koran atau spanduk. Cuma tidak jelas apa rencana mereka ke depan," kata Muhammad serius. ■

Buat Ridwan (34) warga pemukiman Gampong Lhang Pidie, pertanyaan ini sulit dijawab. "Banyak sekali calon, saya sedang melihat yang mana yang paling baik," katanya.

Ridwan mengaku tahu beberapa calon kandidat yang akan bertarung di bursa pemilihan kepala daerah (pilkada) Aceh mendatang. Tetapi menolak berkomentar akan memilih mereka atau tidak. "Wah rahasia, yang pasti saya belum memutuskan," katanya serius.

Berbeda dengan Ridwan yang belum memiliki calon yang baik, Azman (36) warga Sigli justru berpendapat siapa pun calon haruslah dirahasiakan. "Meskipun sudah damai, kita juga mesti yakin betul. Apalagi bukan hanya politisi yang ikut, melainkan juga GAM," katanya serius.



Tabulasi DPS dan TPS

NO.	KABUPATEN / KOTA	JLH PEMILIH (DP4)	JLH PEMILIH SEMENTARA	TPS SEMENTARA
1	BANDA ACEH	146.573	110.201	294
2	SABANG	24.154	19.216	60
3	LHOKSEUMAWA	119.154	98.824	300
4	LANGSA	87.707	93.812	210
5	ACEH BESAR	181.795	188.756	660
6	PIDIE	345.787	312.382	995
7	ACEH UTARA	315.034	296.655	1.023
8	ACEH TIMUR	196.463	201.095	652
9	ACEH TENGAH	96.221	100.252	449
10	ACEH TENGGARA	98.506	108.678	492
11	ACEH BARAT	111.879	98.553	461
12	ACEH SELATAN	127.255	126.037	348
13	SIMEULUE	47.193	47.193	198
14	GAYO LUES	46.841	45.500	197
15	NAGAN RAYA	77.351	83.357	270
16	ACEH JAYA	32.694	43.451	200
17	BIREUEN	221.415	207.667	572
18	ACEH SINGKIL	74.568	85.865	300
19	ACEH BARAT DAYA	68.177	73.225	192
20	ACEH TAMIANG	146.893	142.587	431
21	BENER MERIAH	63.270	70.809	275
JUMLAH		2.628.930	2.555.115	8.579

■ Sumber: Media Center KIP NAD

Ditanya Pilkada, Apakabar UUPA

Mohammad Avicena

Pidie
sjechsyoh@yahoo.com

Gaung Pilkada nampaknya sudah mengemana. Namun informasi dan esensinya masih kurang merata. Bagaimana tidak, di sejumlah pelosok desa, masyarakat masih awam akan hal itu. "Ini banyak sekali calon, siapa yang kita pilih," tanya Saiful Azmi.

Warga Busu, Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie ini mengaku sedikit bingung. Selain banyak calon, baik itu pada pemilihan gubernur maupun bupati. Dia mengaku hingga kini belum punya jagoan.

Tanya UUPA

Lain halnya dengan Muhammad, Rusli dan Teungku Adnan. Ketiga warga desa Barat Yaman, kecamatan Mutiara ini sedikit lebih banyak menyerap informasi. Soal politik mereka lebih melek.

Pun demikian, tanpa menghilangkan animonya dalam Pilkada, mereka menghentak dengan pertanyaan lain. Bagaimana dengan nasib butir-butir perjanjian Helsinki. Problem yang dimaksud adalah UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Undang-undang Pemerintahan Aceh. "Kalau ini belum beres agak sulit menyaksikan Pilkada," timpal Tgk Adnan.

Masyarakat lainnya juga bertanya akan "nasib" UUPA. Apalagi *follow-up* media sangat minim. Nyaris semua media lebih berfokus pada Pilkada yang merupakan juga amanat Mou Helsinki yang dijabarkan lewat UUPA.

Ikut Pilkada

Sejumlah elite Gerakan Aceh Merdeka juga akan ambil bagian pesta demokrasi yang akan digelar pada 11 Desember mendatang. Tentunya secara pribadi bukan atas nama lembaga. Mereka bertarung mulai dilevel gubernur hingga wakolota dan bupati.

Ambil bagian dalam Pilkada, bukan berarti GAM mengalpakan tugas utamanya memperjuangkan UUPA. Elemen yang "terikat" dalam perjanjian itu amat berkepentingan dengan masalah ini. Apalagi, mereka juga "sedikit" keberatan dengan sejumlah pasal dalam UU tersebut.

Beberapa waktu lalu, bekas refrenstatif GAM di Aceh Monitoring Mission (AMM), Irwandi Yusuf mengatakan sudah mengajukan keberatan ke lembaga yang "dikomandani" Peter Fieth itu.

"Kita kita sedang menunggu hasilnya. Sebelum AMM habis tugas mungkin sudah ada," kata Amni bin Ahmad Marzuki, anggota Majelis GAM. "Pilkada harus jalan, UUPA juga harus sesuai dengan MoU." ■



Teri Balado Petai

Resep kali ini lebih akan menyajikan hidangan dengan bahan teri tawar yang banyak dijumpai di pasar. Untuk menambah selera akan dilengkapi dengan petai yang banyak dijumpai di pasar. Cocok untuk teman makan siang.



RESEK DARI TABLOID GENIE

Bahan

- 200 gr ikan teri tawar
- 2 Papan Petai padi muda
- Minyak untuk menggoreng
- 1 sendok teh air jeruk nipis

Bumbu Halus

- 50 gr cabai merah
- 3 siung bawang putih
- ½ sendok teh garam
- ½ sendok teh gula

Cara Membuat

- Bersihkan teri dan buang kepalanya. Iris petai bebarta kulit setelabl ½ cm. Sisihkan
- Panaskan minyak goreng dalam wajan
- Goreng Petai dan ikan teri secara terpisah. Sisihkan
- Panaskan 4 sendok teh minyak goreng, Tumis bumbu petai sampai harum
- Masukkan air perasan jeruk nipis dan aduk hingga bumbu matang dan berminyak
- Masukkan ikan teri dan petai
- Sajikan segera

■ Resep dari Tabloid genie

Bagi Anda yang memiliki resep unik yang bisa dimasak dengan mudah dan enak, bisa mengirim surat ke **PO BOX 061 Banda Aceh 23001**. Email: ceureumen@gmail.com. Cantumkan alamat lengkap. *Ceureumen* akan mengunjungi Anda dan melihat Anda memasak. Disediakan bingkisan kecil untuk Anda.

>> INFO

Di mana Bisa Memperoleh *Ceureumén*

Untuk pembaca yang berdomisili di Aceh Jaya – Aceh Barat – Nagan Raya. Anda bisa mendapatkan tabloid ini di:

Kantor PPK Aceh Jaya

CP : Drs. Mahmud Al Husyi / 081360568487
Junaidi, ST / 08126908407

Puskesmas Pembantu (Pustu) Meudhen

Lamno – Aceh Jaya,
Hub: Ibu Novi Nurdiani

Puskesmas Lamno

Jl. T.Umar KM 83
Pasar Lamno – Aceh Jaya
Hub: Dr. Rahmawati dan Ibu Darmi

Puskesmas Patek

Kecamatan Sampoi Niet – Aceh Jaya

Hub: Bp. Agus Amin Jafari

Puskesmas Teunom

Kecamatan Teunom – Aceh Jaya
Hub: Dr. Ira Silvia

Masjid Agung Meulaboh

Jl. Imam Bonjol Meulaboh – Aceh Barat
Hub : Muchsinuddin, S.Ag - Arabial Syafwandi

Puskesmas Johan Pahlawan

Jl. Tgk. Dirundeng Meulaboh – Aceh Barat
Hub : Dr. Cut Putri Y. - Ibu Zunaimar

Puskesmas Meureubo

Jl. Datuk Janggut Meuh – Aceh Barat
Hub : Dr. Iskandar - Darmawati

Kantor PPK Nagan Raya

Jl. Al Fitrah N0.4 (Arah Gudang PLN)
Hub: Bp. Dedy H, ST

Puskesmas Padang Rubek

Jl. Nasional Kecamatan Kuala – Nagan Raya
Hub : H. Zainal Abidin T.M. Husen – Dasmiami

Puskesmas Cot Kuta

Kecamatan Seunagan – Nagan Raya
Hub : Dr. Zatwan Yusuf Afwandi — Ibu Rosniar Leka

Masjid Agung Nagan

Nagan Raya
Hub : Bp. Jamaluddin, S.Pdi

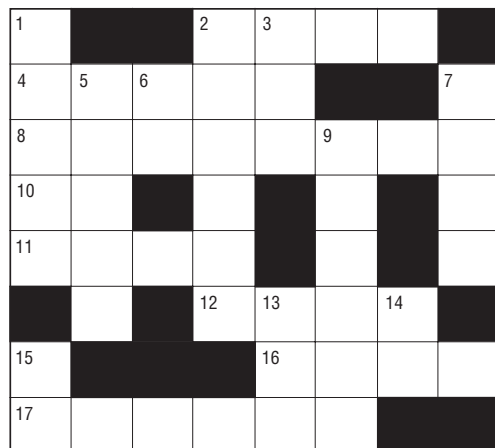
Ibu-ibu PKK & Dharma Wanita

Jeuram – Nagan Raya
Hub: Ibu Armanusyah-Ibu Hafni

Alamat-alamat di atas akan dimuat lagi di *Ceureumén* Minggu depan



TEKA TEKI SILANG CEUREUMÉN No. 32



Menurun :

1. Anak Perawan
2. keadaan yang masih suci
3. Paman (Aceh)
5. Gelisah
6. Surat Keputusan
7. Dari (Inggris)
9. Penawaran untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
13. Gagasan
14. Lihat (Aceh)
15. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor NAD

Mendatar :

2. Tingkatan Masa perubahan
4. Dokumen tertulis yang disim-

- pan dan dipelihara dengan aman
8. Pemimpin yang menjalankan tugas dengan sewenang-wenang
10. To be
11. Suku Agama dan Ras
12. Kulit Hewan
16. Dangkal (Aceh)
17. Makanan yang dibuat dari beras ketan dimasak diisi dengan abon dan dibungkus dengan daun pisang

Pemenang TTS Edisi 28

1. T. Bachtiar Gade
Jln. Seupeng-Krueng Seu-

- meideun
Desa Jurong
Krueng Seumideun
Kec. Paukan Baro
Kabupaten Pidie
2. Ibrahim Hasandy
Desa Pasheu Beutong
Kecamatan.
Darul Imarah
Aceh Besar
3. Ikhwanul F
Mhs. Fak. MIPA-Biologi
Unsyiah,
Darussalam
B. Aceh

Pengumuman pemenang TTS akan diumumkan setiap dua edisi berikutnya. Jawaban di kirim ke Po.Box 061 Banda Aceh. Kepada 5 (lima) pemenang akan mendapatkan kamus Bahasa Indonesia-Inggris.

>>> TANYA JAWAB

Ingin Mengetahui Kekayaan Calon

Apakah warga bisa mengetahui berapa besar nilai kekayaan seorang kandidat gubernur atau bupati dan wakilnya? Menurut saya, informasi ini amat penting, mengingat warga akan bisa menilai berapa kekayaan yang bersangkutan sekarang dan berapa nantinya kalau jadi terpilih. Selain itu, warga juga akan mengetahui apa jabatan atau pekerjaan kandidat yang bersangkutan sebelumnya, sehingga mempunyai kekayaan sebanyak itu?

Muhammad Muchsin, Darussalam, Banda Aceh

Menurut pasal 33 poin 2 Qanun nomor 7 tahun 2006 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota/wakil walikota di Provinsi NAD, disebutkan bahwa, "Bakal calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; (k) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan."

Menurut Zainuddin, T, anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi, pasal ini bermakna bahwa para calon harus bersedia jika KIP mengumumkan kekayaan mereka. Di sisi lain juga bermakna bahwa tidak ada kewajiban dari KIP untuk mengumumkan kekayaan para calon. Artinya, bisa diumumkan, bisa juga tidak diumumkan. Menurut Zainuddin T, proses penyediaan formulir kekayaan yang harus diisi oleh para kandidat, verifikasi, dan lain-lainnya semuanya ditangani oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan Kekayaan tak Sesuai Fakta

Seandainya ada kandidat yang melaporkan kekayaan tidak sesuai dengan fakta atau ada keanehan lainnya, kemana kami bisa melaporkan? Untuk maksud tertentu, bukan tidak mungkin mereka cenderung mengecilkan kekayaan mereka atau sebaliknya?

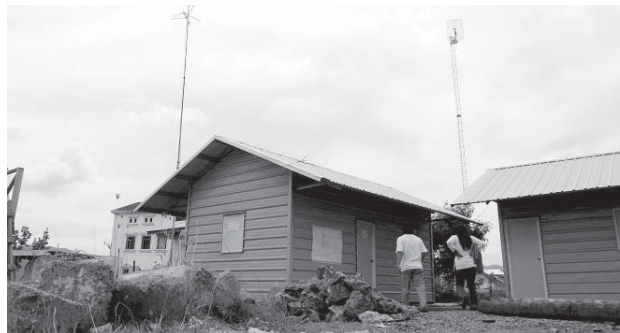
Salmiati, Meureudu, Pidie

Untuk informasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bisa menghubungi KPK Direktorat PP LHKPN, Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta 10110, telp (021)3522546-50 ext 162, (021) 3508396, fax:(021) 350 5179, email: informasi.lhkpn@kpk.go.id

Atau bisa juga: KPK Pengaduan Masyarakat Banda Aceh Gedung AAC Dayan Dawood Lt 2 Darussalam, Banda Aceh, telp 0651-7551575, 0651-7400574, fax: 0651-7552575.

Anda bisa mengirimkan pertanyaan apa pun yang ingin Anda ketahui, terutama mengenai masalah rekonstruksi dan rehabilitasi. Redaksi akan mencari jawaban untuk pertanyaan Anda. Kirimkan ke **PO BOX 061 Banda Aceh 23001** atau email ceureumen@gmail.com dengan mencantumkan "Rubrik Tanya Jawab"

Good Morning Meuraxa...



Teuku Ambral

Banda Aceh
ambral_ponda@yahoo.com

Meuraxa di suatu siang masih centang perenang. Tak banyak yang berubah meski bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami hampir dua tahun berlalu.

Kendati beberapa bangunan rumah bantuan lembaga donor telah berdiri, namun belum mampu menghilangkan hampanan luas tanah dan puing sisa reruntuhan bangunan, di areal *buffer zone* itu.

Di tengah gersangnya hampanan tanah dan sisa embok rusak, sebuah antena radio tampak tegar berdiri. Radio yang berdiri bersebelahan dengan kuburan massal itu

tak lain sebuah radio komunitas milik masyarakat Kecamatan Meuraxa.

Pengadaan fasilitas radio dilakukan oleh sebuah lembaga yang aktif dalam mengembangkan media informasi berbasis akar rumput atau yang dikenal dengan nama *Combine Resource Institution*. Dia didirikan sekitar tiga bulan yang lalu lewat kesepakatan bersama yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat setempat.

Kegiatan

Jika biasanya dua penyiar radio menyapa warga untuk memberikan hiburan lewat informasi dan koleksi lagu-lagunya. Pekan lalu itu sedikit berbeda. Tak biasanya barisan motor dan suara percakapan terdengar dibalik dinding bangunan berukuran

2x3 itu. Mereka adalah putra dan putri Meuraxa yang sedang berkumpul melakukan diskusi mingguan dengan pengurus radio.

Aktivitas mingguan itu biasanya dilakukan para pengurus radio atau yang lebih di kenal dengan istilah Badan Pengurus Penyiaran Komunitas (BPPK). Forum ini membahas diskusi soal rencana kegiatan dan permasalahan yang tengah dihadapi oleh radio.

Biasanya pertemuan itu selalu dihadiri oleh perwakilan Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) sebuah istilah bagi perwakilan masyarakat yang ditunjuk sebagai pengambil kebijakan atau keputusan akhir di lembaga tersebut.

Bukan saja DPK dan BPPK, biasanya pengurus juga mengundang perwakilan warga atau tokoh masyarakat dari masing-masing desa yang ada di Meuraxa, untuk melakukan hal yang sama. Ini sebagai bagian mensosialisasikan radio secara lebih luas, sehingga timbul rasa memiliki di hati masing-masing warga.

Informasi

"Radio Meuraxa" bukan hanya sekadar *request* lagu dan kirim mengirim salam. Dia juga menghadirkan informasi dan berita mengenai perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan itu.

Informasinya beragam mulai dari informasi mengenai pembangunan rumah, nasib pengungsi, bantuan dana, kegiatan

ekonomi hingga kecurangan yang terjadi didalamnya. Itu merupakan menu hidangan rutin berita yang disajikan kepada warga.

Selain berita, sekumpulan remaja itu juga pernah membuat program siaran *talk show*. Tak tanggung-tanggung mereka mampu menghadirkan perwakilan lembaga internasional sekaligus United Nations (PBB) sebagai nara sumber.

Talk show biasanya diisi pembicaraan mengenai tanggapan lembaga yang berwenang terhadap masalah yang terjadi. Tentu saja yang berkaitan baik langsung maupun tidak dengan lembaga itu.

Hasilnya tidak sedikit warga yang mendengarkan *talk show* itu mengirimkan pertanyaan dan tanggapan mereka melalui sms. "Kita juga pernah mengundang warga untuk program *talk show*, kalau pejabat di undang udah biasa, tapi kalau masyarakat kecil siapa peduli," ketusnya.

Radio ini seakan mengingatkan kita pada sebuah sekuel dalam film "Good Morning Vietnam". Dia dihadirkan guna membangkitkan gairah hidup tentara Amerika Serikat dalam perang itu. Setiap pagi, Adrian Cronauer, sang penyiar dari Divisi Penerangan kerap menyapa rekan-rekannya dengan lengkingan tinggi "Goood Morniiiiiiii Vietnaaamm!!!".

Nah, dengan radio ini semoga juga bisa menjadi cara atau apapun namanya untuk menggerek kembali gairah hidup warga Meuraxa. ■

>> KANDIDAT



Tamlicha Ali: TNI dan Polri Dibutuhkan Rakyat



Muhammad Azami

Banda Aceh
muhammad2004@yahoo.com

Letjen (Purn) Tamlicha Al Muntadzar Ali salah satu calon gubernur. Dia akan berduet dengan Drs Tgk Harmen Nuriqmar dalam Pilkada nanti. Bagaimana pola pikirnya soal Aceh. Berikut wawancara singkat dengan pria berkumis tebal ini.

Apa alasan Anda mencalonkan diri sebagai Gubernur?

Saya memang putra Aceh yang berkecimpung di militer dan tugas-tugas pemerintahan lainnya hampir 40 tahun dan semuanya berada di luar Aceh. Jadi, saya belum bertugas di Aceh. Saya lihat perkembangan Aceh sangat menyedihkan, sejak awal Aceh sudah berada dalam konflik, setelah itu ter-

jadi tsunami yang cukup parah, sehingga hati saya tersenyuh; bergetar, tapi belum mendapat kesempatan mengabdikan di sini. Saya berdoa kepada Allah, berikanlah saya kesempatan untuk mengabdikan kepada Aceh, karena keadaannya yang begitu sulit.

Berarti Anda sangat optimis, dari mana konstituennya?

Tekad optimis harus ada, tetapi tentu kita akan melihat kenyataan yang realistik. Dan yang paling penting, itu semua terpalang kepada rakyat Aceh. Kalau saya terpilih, saya akan memimpin Aceh dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, kalau pun tidak, insya Allah saya akan tetap memikirkan Aceh dengan cara yang lain. Saya memang berharap dukungan keluarga besar TNI, keluarga besar Polri. Lalu, saya juga pernah bertugas selaku Sekjen Departemen Transmi-

grasi. Jadi, mungkin suara-suara dari warga transmigrasi. Nah, yang lebih menonjol lagi, karena calon wakil gubernur saya seorang ulama muda, maka saya berharap jaringan-jaringan ulama, jaringan santri. Itu kira-kira konstituen utama yang akan mendukung saya.

Apa pendapat Anda dengan citra negatif masa lalu TNI di Aceh?

Saya pikir, citra itu bisa terbawa terus atau bisa berubah. Dan saya yakin imej yang lalu tercipta oleh beberapa tingkah laku atau mungkin oknum. Saya pernah menjadi pejabat militer, pernah menjadi panglima, saya berusaha menanamkan disiplin yang baik. Saya selalu mengajarkan kepada anak buah untuk menghormati rakyatnya. Jadi, saya yakin itu sangat tergantung kepada pemimpinnya. Pemimpin yang baik, pemimpin yang kuat, bisa menjaga betul anak-anak, sehingga tidak boleh terjadi kasus apa pun. Nah, ke depan, kalau saya berhasil, saya akan berusaha merangkul pimpinan TNI dan polisi untuk sama-sama membangun Aceh. Saya yakin TNI dan Polri sangat dibutuhkan oleh rakyat.

Apa Anda tak enggan bersaing dengan purnawirawan yang lain?

Kita maju, biar satu, biar dua, itu hak berdemokrasi. Juga hak berdemokrasi bagi keluarga besar TNI untuk menjatuhkan pi-

lihannya kepada keluarga besar TNI yang juga menjadi kandidat.

Tapi, masyarakat bertanya-tanya mengapa Anda sering mengganti-ganti wakil?

Memang, awalnya Pak Mukhlis Mukhtar wakil saya, tapi beliau sakit, maka saya ganti. Kalau tidak, saya tidak bisa maju. Setelah itu Partai Demokrat yang sudah bergabung dengan kita, kita tanyakan, siapa Cawagub pengganti Pak Mukhlis. Lalu, mereka sepakat penggantinya adalah Pak Nova. Lalu, ada masalah-masalah internal dan mereka mungkin punya pertimbangan lain, beliau akhirnya mundur. Alhamdulillah saya kemudian mendapatkan wakil dari PBR (Partai Bintang Reformasi, *red*), yaitu Tgk Harmen Nurigmar.

Bagaimana pandangan Anda dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh?

Justru saya menganggap syariat Islam itu sebagai hal yang mendasar bagi rakyat Aceh. Tekad untuk menegakkan syariat Islam, harusnya diprogramkan secara sistematis dan berkelanjutan. Itu juga pertimbangan dari saya, sehingga memilih calon wagub seorang ulama. ■

Data Singkat

Nama : Letjen (Purn) Tamlicha Al Muntadzar Ali
Populer : Tamlicha Ali
Lahir : Banda Aceh, 14 Juni 1944
Karier : Mantan Danjen AKABRI, Mantan Pangdam VII/Wirabunga

Korban Bertanya, BRA Menjawab



Mounaward D. Ismail
Banda Aceh
sjechsyoh@yahoo.com

Pada pertengahan Agustus lalu, Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dengan nama Bantuan Reintegrasi Berbasis Masyarakat Bagi Korban Konflik. Program ini merubah pendekatan penyaluran yang sebelumnya berbasis proposal

menjadi berbasis masyarakat. Dengan menggunakan mekanisme Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang tersebar di seluruh desa di 17 kabupaten Aceh dan telah mendapat kepercayaan masyarakat, BRA berharap agar masyarakat korban konflik dapat menerima bantuan seadil-adilnya. Selama ini banyak yang bertanya tentang seluk-beluk penyaluran dana

untuk korban konflik ini. Melalui Tabloid *Ceureumen*, setiap bulannya tim BRA menjawab pertanyaan masyarakat yang masuk melalui pesan singkat atau sms. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban untuk bulan ini.

Kebijakan BRA-PPK

Bagaimana mekanisme yang jelas untuk menangani kasus korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan program penyaluran dana bantuan reintegrasi berbasis masyarakat bagi korban konflik?

Apabila terdapat penyalahgunaan dana atau korupsi dalam ataupun

pengaduan lainnya dalam program BRA-PPK, masyarakat bisa melapor melalui:

SMS : 0813-608-56-001

Surat : P.O. Box 063, Banda Aceh;

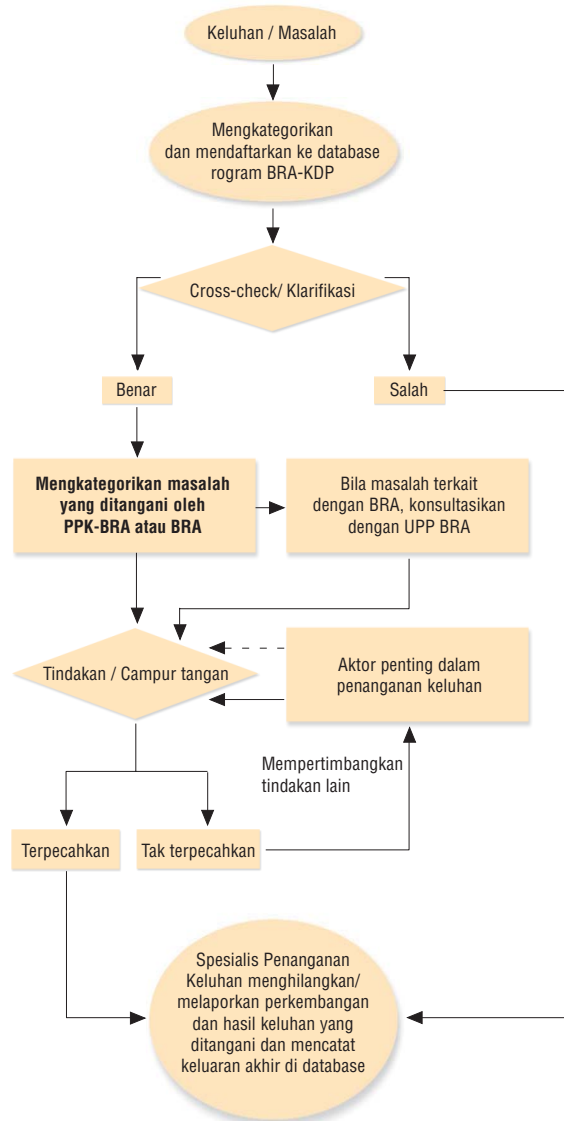
Datang langsung:

Kantor KM Kabupaten; Kantor BRA Kabupaten; atau Kantor PPK Provinsi Jl. T. Iskandar Lr. Tgk. Bak Ara No.4, Simpang Ilie, Ulee Kareng, Banda Aceh)

Pengaduan masyarakat akan melalui proses sebagai berikut untuk kemudian ditindaklanjuti:

DIAGRAM

PENANGANAN KELUHAN DAN MASALAH



Catatan:
————> Jalur Penanganan Keluhan
- - - - -> Jalur Pemantauan

Dimulai Dari Musyawarah

Sejauh mana tahapan penanganan program bantuan ini sudah berjalan, mohon dijelaskan agar masyarakat tidak bertanya-tanya kenapa dana bantuan itu belum juga terealisasi?

Pelatihan para fasilitator baru saja selesai. Dalam waktu dua minggu, Musyawarah Antar Desa Sosialisasi bisa dimulai. Musyawarah Antar Desa Sosialisasi merupakan langkah pertama dalam siklus kegiatan, di mana program akan disosialisasikan kepada masyarakat umum di tingkat kecamatan. Dalam musyawarah ini, masyarakat akan menyusun jadwal pelatihan FD, menetapkan penggunaan dana operasional 6% dan menetapkan besar alokasi setiap desa.

Beda Program Ini

Apakah perbedaan penanganan masalah diyat, bantuan rumah, bantuan kesehatan dengan program baru ini?

Badan Pelaksana BRA memiliki tiga

program bidang yaitu pemberdayaan ekonomi, sosial budaya dan data dan monev (monitoring evaluasi). Penyediaan diyat, bantuan rumah dan bantuan kesehatan adalah program-program dari **bidang sosial**, sedangkan penyediaan bantuan pemberdayaan ekonomi kepada mantan TNA, mantan tapol/napol, GAM non TNA, GAM yang menyerah sebelum MoU, relawan PETA serta masyarakat korban konflik adalah program-program dari **bidang pemberdayaan ekonomi**. Program Bantuan Reintegrasi Berbasis Masyarakat Bagi Korban Konflik adalah bagian dari bidang pemberdayaan ekonomi.

Kapan dana akan dicairkan?

Dana tahap 1 sebesar 6% khusus untuk penggunaan operasional kegiatan akan dicairkan secepatnya setelah Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD 1), sekitar akhir bulan Oktober atau awal November. Dana tahap 2 sebanyak 50% akan disalurkan ketika desa siap melaksanakan program setelah penandatanganan Surat Penetapan Camat, kira-kira satu bulan setelah pencairan tahap pertama. Tahap terakhir penyaluran dana sebesar 44% akan dilaksanakan setelah musyawarah pertanggungjawaban.



M. M. JULIANI